

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Kesehatan dan Pendidikan, serta Pertumbuhan Ekonomi sebagai Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Barat

Syahrini¹

Baso Iwang²

Email: rini.12syahrini.12@gmail.com

^{1,2} Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional own-source revenue (PAD), government expenditure on health sector, and government expenditure on education sector on economic growth and Human Development Index (HDI) in West Sulawesi Province in 2007-2023. In addition, this study also explored the indirect effect of these variables on HDI through economic growth. Using the regression analysis method, the results show that PAD has a positive but insignificant effect on economic growth. Income inequality between regions causes variations in economic growth in West Sulawesi. Health sector government expenditure also had a positive and insignificant effect on economic growth due to inappropriate budget allocation and weak planning capacity. Education sector government expenditure had a negative and significant effect on economic growth, indicating improved human quality through education.

For the effect on HDI, PAD showed a negative and insignificant effect, while health sector expenditure had a negative and significant effect, indicating that the health budget has not had the expected impact. In contrast, education expenditure had a positive but insignificant effect on HDI, although the development of education facilities has increased. Economic growth also had a positive but insignificant effect on HDI. Indirectly, PAD and health expenditure had a negative and insignificant effect on HDI through economic growth, while education expenditure showed a positive and insignificant effect. This study suggests the need for a more appropriate budget allocation strategy to improve economic growth and HDI in West Sulawesi.

Keywords: *Region own source Revenue, Government Expenditure, Economic Growth, Human Development Index, West Sulawesi.*

ARTICLE INFO

Received 30/08/2024

Accepted 31/08/2024

Online 31/04/2024

*Correspondence: Syahrini

E-mail:

rini.12syahrini.12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2007-2023. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pengaruh tidak langsung dari variabel-variabel tersebut terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Menggunakan metode analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan antar daerah menyebabkan variasi dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan juga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena alokasi anggaran yang tidak tepat dan kelemahan kapasitas perencanaan. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan.

Untuk pengaruh terhadap IPM, PAD menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan, sementara pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan, mengindikasikan bahwa anggaran kesehatan belum memberikan dampak yang diharapkan. Sebaliknya, pengeluaran pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, meskipun perkembangan fasilitas pendidikan sudah meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Secara tidak langsung, PAD dan pengeluaran kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran pendidikan menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan. Penelitian ini menunjukkan perlunya strategi alokasi anggaran yang lebih tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan IPM di Sulawesi Barat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Sulawesi Barat.

Pendahuluan

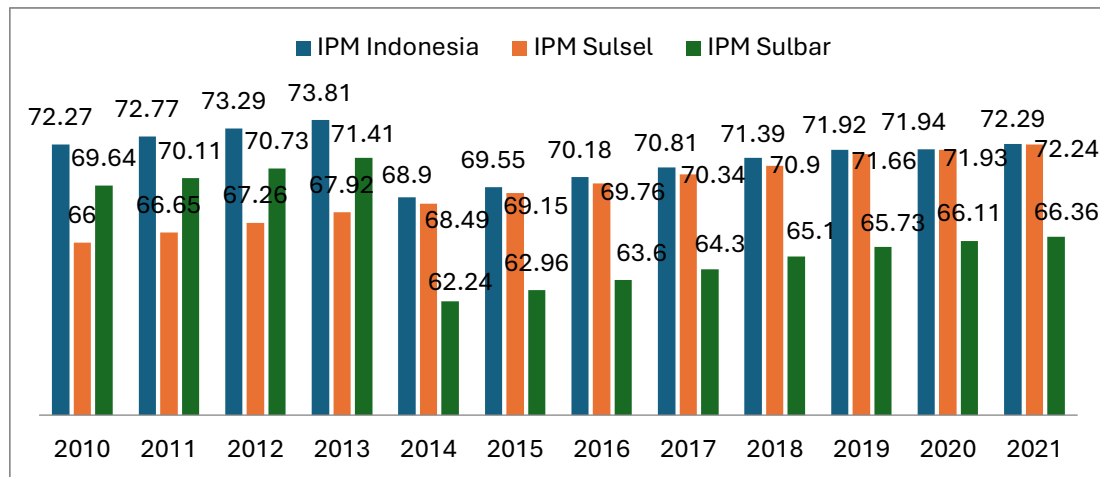
Pemerintah dan seluruh rakyat harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Damayanti (2014), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (HDI), adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. IPM adalah indeks komposit yang dirancang untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dan didasarkan pada sejumlah elemen penting dari kualitas hidup. Laporan HDI menunjukkan bahwa beberapa komponen HDI di Indonesia adalah dimensi hidup layak melalui indikator pendapatan nasional bruto per kapita (GNI per kapita), dimensi pendidikan melalui indikator harapan tahun bersekolah (expected years of schooling), rata-rata waktu sekolah (mean years of schooling), dan angka hidup (life expectancy at birth) dalam dimensi kesehatan (Verawaty, Wahasusmiah, dan Amnah 2020).

Kebijakan fiskal digunakan untuk meningkatkan IPM di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui kebijakan fiskal untuk menyediakan barang dan jasa kepada sektor publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar atau sektor swasta. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti akses terhadap kecukupan makanan (nutrisi yang cukup) dan air, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan non-material seperti pekerjaan, perlindungan, dan kebebasan politik adalah fokus utama dalam penyediaan barang dan jasa publik ini (Ramzi, 2012). Masalah sosial dapat muncul jika salah satu kebutuhan ini tidak ada atau pasokannya sangat sedikit (Fretes 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. IPM diukur melalui dimensi kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup yang layak, yang diukur dengan paritas daya beli (Setiawan dan Budiana 2015).

Di Indonesia, peningkatan pendapatan daerah dan IPM tidak sama di semua provinsi. Ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan pemerintah daerah setempat, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Sulbar mengalami fluktuasi pada tahun 2014. Ini turun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 71,41 menjadi 62,24, dan kemudian naik lagi dari tahun 2014 hingga 2021. Namun, angka tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah Sulbar dalam RPJMD. Target 68% yang ditargetkan untuk tahun 2022 belum tercapai karena pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Angka IPM juga menurun sebagai akibat dari pandemi ini. Ini ditunjukkan

dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,58% pada tahun 2020 dan hanya tumbuh 0,39% pada tahun 2021.



Gambar 1. IPM Indonesia, IPM Sulsel, dan IPM Sulbar Tahun 2010-2021

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2022)

IPM Sulbar juga masih berada pada kategori sedang sejak tahun 2011, kategori IPM tinggi dimulai pada 70% angka tersebut masih cukup jauh dengan IPM Sulbar tahun ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada peringkat 31 secara nasional, walaupun berada pada posisi 31 nilai IPM Sulbar konsisten mengalami peningkatan di atas Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

Proses perbaikan kondisi ekonomi suatu negara secara bertahap menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat digambarkan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross Nasional Product* (GNP), tidak peduli apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah ada perubahan struktur ekonomi (Arini Rosita Prima dan Kusuma Wulan Manggar, 2019; Manek dan Badrudin, 2017).

Tingkat pembangunan manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Teknologi dan hubungan kelembagaan merupakan sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan paradigma pembangunan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diukur melalui pembangunan manusia (Setiawan dan Budiana 2015).

Salah satu komponen keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dapat memutuskan tentang pendapatan daerah mereka sendiri, dan untuk melakukannya, mereka harus mendapatkan dukungan keuangan dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat menunjukkan pertumbuhan pada ekonomi daerah.

PAD berkontribusi pada peningkatan IPM; dengan kata lain, PAD mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah, juga dikenal sebagai PAD, adalah pendapatan yang diterima oleh daerah menurut peraturan daerah dan undang-undang (Darize, 2009). Pajak Daerah, Retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah yang Lain terdiri dari PAD, menurut UU 3/2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PAD dapat digunakan dalam bidang tertentu, seperti belanja mode; namun, belum ada undang-undang yang mengatur penggunaan dana tersebut (Utami dan Indrajaya 2019).

Upaya meningkatkan IPM tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah menggunakan pendapatan pemerintah untuk belanja pemerintah pada sektor-sektor yang dapat menaikkan pendapatan IPM seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Alokasi belanja sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang berdampak jangka panjang, seperti membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah aktiva tetap sehingga bermanfaat tidak hanya dalam siklus akuntansi, beserta dengan pembiayaan untuk pemeliharaan yang bersifat meningkatkan kegunaan dari aktiva tersebut (Sari dan Supadmi 2016).

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk membeli barang atau jasa dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas modal manusia dari sisi pendidikan dan kesehatan (Anantika dan Sasana 2020). Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Laisina, Masinambow, dan Rompas 2015).

Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi yang merupakan suatu komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Diperlukan upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas kesehatan terutama fasilitas upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), Rehabilitatif diharapkan merupakan titik balik kebijakan di Sulbar dalam menangani kesehatan penduduk yang berarti program kesehatan yang menitikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa bukan sekedar penyembuhan penyakit.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah di capai oleh penduduk usia 15 tahun, tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis yang merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, Realisasi dana pada bidang pendidikan di mana mampu meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan melek huruf dan lamanya pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat.

Data dan Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menjadi metode dalam melakukan penelitian ini. Data ini disusun dalam urutan waktu dari tahun 2008 hingga 2021. Data yang berkaitan dengan penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan alat analisis jalur (Path Analysis). Analisis jalur yang digunakan untuk menguji variabel intervening. Dengan menggunakan analisis jalur, peneliti dapat menemukan jalur paling tepat dan singkat untuk variable independent (Y)

dengan variabel dependent (X) yang diformulasikan dan untuk melihat hubungan antara Pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pendidikan dan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.

$$Y_2 = f(X_1, X_2, X_3) \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2, X_3, Z) \dots \dots \dots (2)$$

Dari persamaan sebelumnya maka dapat dituliskan kembali dalam persamaan non linear berikut:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1x_1 + \alpha_2x_2 + \alpha_3x_3 + e_1 \dots \dots \dots (3)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e_1 \dots \dots \dots (4)$$

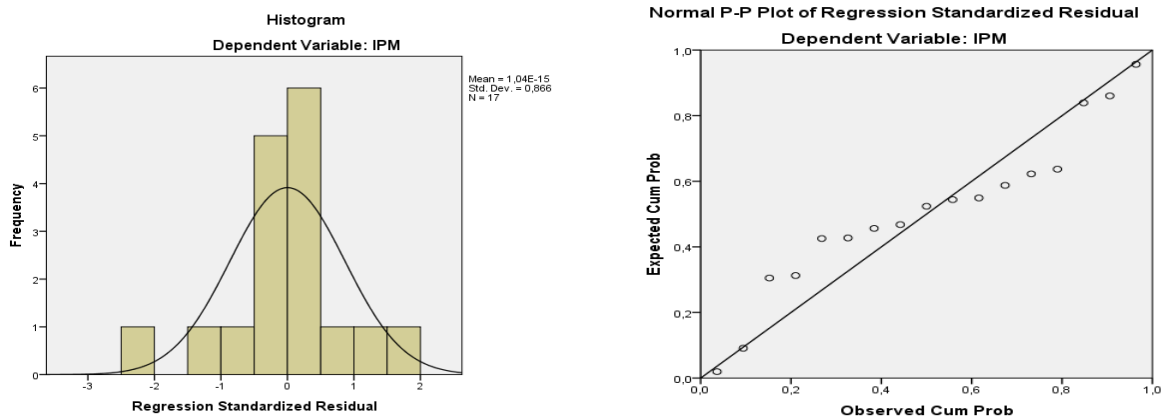
Keterangan: Y_1 merupakan IPM; Kinerja keuangan (%); Y_2 diartikan sebagai Pertumbuhan Ekonomi (%); X_1 merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp); X_2 merupakan realisasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (Rp); X_3 merupakan realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (Rp); α_0, β_0 adalah Konstanta; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah Koefisien regresi; dan e_1, e_2 adalah *Error term*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Asumsi Klasik

Tujuan uji normalitas untuk menguji apakah suatu sampel data mengikuti distribusi normal berdasarkan skewness (ketidaksimetrisan) dan kurtosis puncak). Uji ini digunakan agar dapat memberikan informasi tentang sejauh mana data kita sesuai dengan distribusi normal dan dapat digunakan untuk memvalidasi asumsi normalitas dalam analisis statistik parametrik. Adapun uji yang digunakan adalah uji pendekatan grafik histogram, P-P Plot dan uji Kolmogrov Hasil uji normalitas yang telah di olah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Gambar 2 menunjukkan bahwa garis histogram mengikuti dan mendekati kurva yang artinya data tersebut terdistribusi normal. Selain itu, kurang bervariasi dan dapat dikategorikan baik.

Hal ini dibuktikan dengan adanya *mean* yang lebih besar dari standar deviasi ($0,866 < 1,04$). Gambar ini juga menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal, hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran titik P-P Plot yang mengikuti garis diagonalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan gambar P-P Plot *regression standardized residual* di mana regresi model memenuhi asumsi normalitas. Kemudian berdasarkan uji normalitas P- P Plot menunjukkan bahwa titik-titik yang ada berada disepanjang garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi juga data pada penelitian ini berdistribusi secara normal yang dapat dilihat pada grafik P-P Plot.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki korelasi yang kuat pada bentuk regresinya. Toleransi tidak dapat dikaitkan dengan variabel independen lainnya karena menghitung keberagaman variabel independen terpilih. Oleh karena itu, penilaiannya umumnya adalah digunakan ialah toleransi 0,10 atau penilaian VIF lebih tinggi dari sepuluh.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

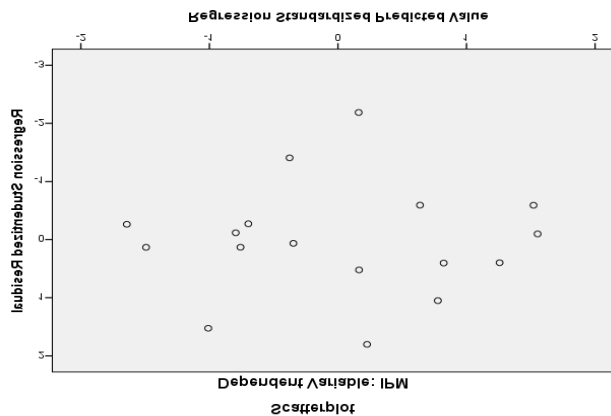
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
	(Constant)		
1	PAD	,844	1,185
	Kesehatan	,357	2,798
	Pendidikan	,216	4,633
	Pertumbuhan	,356	2,807

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Berdasarkan pada uji multikolinearitas pada Tabel 8 diketahui bahwa, semua variabel independen dan variabel intervening dalam penelitian ini memiliki nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas yang terjadi dalam penelitian ini.

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menentukan melalui regresi apakah variansi residual sama dari satu observasi ke observasi lainnya. Istilah "homoskedastisitas" mengacu pada keadaan di mana ada perbedaan. Uji scatter plot digunakan untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas dalam suatu penelitian. Jika terjadi kesebaran titik pada garis scatter plot dengan pola teratur, maka data tersebut dianggap heteroskedastisitas. Hasil dari pengolahan data untuk uji heteroskedastisitas menggunakan diagram scatterplot, memperlihatkan bahwa pola scatterplot tidak menunjukkan adanya pola yang jelas dan titik-titik yang ada terdistribusi secara acak, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Pengujian autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk regresi linear memiliki korelasi di antara error pada periode sekarang dan error pada periode sebelumnya atau tidak. Untuk melakukannya, uji penilaian *Run test* digunakan. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan nilai runs test sebesar 0,128 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai signifikan (*asympt sig*) berada di atas 0,05.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,14275
Cases < Test Value	8
Cases >= Test Value	9
Total Cases	17
Number of Runs	13
Z	1,523
Asymp. Sig. (2-tailed)	,128

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen (PAD, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Hasil uji regresi model 1 menunjukkan seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen itu sendiri. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan pada Tabel 3 diperoleh model persamaan 1 sebagai berikut:

$$Y = 9,899 + 8,763X_1 + 2,769X_2 + 1,177X_3$$

Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh hasil persamaan α_0 yaitu sebesar 9,899 artinya apabila variabel PAD (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_3) tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi

(Y_1) sebesar 9,89. Nilai koefisien α_1 yaitu sebesar 8,7639. Hal ini menunjukkan bahwa ketika koefisien positif artinya terjadi pengaruh yang searah arah antara PAD (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1). Nilai tersebut menunjukkan bahwasanya jika PAD (X_1) meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi (Y_1) akan meningkat sebesar 8,76 dengan asumsi bahwa variabel independen lain bersifat tetap (konstan). Nilai koefisien α_2 yaitu sebesar 2,769. Hal ini menunjukkan koefisien yang bernilai positif artinya, terjadi pengaruh yang searah antara variabel Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1). Nilai tersebut menunjukkan bahwasanya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar 2,76, dengan asumsi bahwa variabel independen lain bersifat tetap (konstan). Dan, Nilai koefisien α_3 yaitu sebesar 1,177. Hal ini menunjukkan bahwa ketika koefisien positif artinya terjadi pengaruh yang searah antar pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1). Nilai tersebut menunjukkan bahwasanya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_3) meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi (Y_1) akan meningkat 1,177 dengan asumsi bahwa variabel independen lain bersifat tetap (konstan).

Tabel 3. Hasil Regresi Model Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	Sig.
(Constant)	9,899	1,445		,000
PAD	8,7639	,000	,002	,990
Kesehatan	2,76912	,000	,055	,846
Pendidikan	1,17711	,000	,846	,008

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Tabel 4 menyajikan model persamaan regresi berganda model persamaan 2 sebagai berikut:

$$Y_1 = 68,071 - 4,320X_1 - 3,598X_2 + 7,728 X_3 + 0,272 Y_1$$

Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda Model Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	Sig.
1 (Constant)	68,071	3,315		,000
PAD	-4,3207	,000	-,140	,557
Kesehatan	-3,59811	,000	-,858	,033
Pendidikan	7,72812	,000	,668	,170
Pertumbuhan	,272	,296	,327	,377

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Nilai koefisien β_0 yaitu sebesar 68,071, hal ini menunjukkan bahwa ketika PAD (X_1) meningkat sebesar 1% maka IPM (Y_2) mengalami kenaikan sebesar 68,071 dengan asumsi PAD (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) konstan. Kemudian nilai koefisien β_1 yaitu sebesar -4,320, hal ini menunjukkan bahwa ketika PAD (X_1) menurun sebesar 1% maka IPM(Y_2) mengalami penurunan sebesar -4,320, dengan asumsi PAD (X_1), pengeluaran pemerintah sektor

kesehatan (X_2), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) konstan. Selanjutnya, nilai koefisien β_2 yaitu sebesar -3,598, hal ini menunjukkan bahwa ketika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) menurun sebesar 1% maka IPM (Y_2) meningkat sebesar -3,598 dengan asumsi PAD (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) konstan. Nilai koefisien β_3 yaitu sebesar 7,728, hal ini menunjukkan bahwa ketika perpengeluaran sektor pendidikan (X_3) meningkat sebesar 1% maka IPM (Y_2) akan mengalami penurunan sebesar -0,004 dengan asumsi PAD (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) konstan. Dan, nilai koefisien β_4 yaitu sebesar 0,272, hal ini menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi (Y_1) meningkat sebesar 1% maka IPM (Y_2) akan mengalami kenaikan sebesar 0,272 dengan asumsi PAD (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_3) konstan.

Uji Simultan/Uji F

Uji simultan umumnya digunakan untuk menentukan apakah pengaruh variabel independent (variabel bebas) terhadap variabel dependent (variabel terikat) secara signifikan. Uji ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$) sebagai acuan. Tabel 5 menunjukkan hasil uji F Persamaan 1

Tabel 5. Hasil Uji F Model Persamaan 1

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	118,241	3	39,414	7,830	,003 ^b
Residual	65,434	13	5,033		
Total	183,675	16			

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada Tabel 5 menyatakan bahwa variabel PAD, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap variabel IPM, dengan presentase taraf signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X) dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X) memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Adapun hasil uji simultan pada nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7.830 > 2,131$).

Tabel 6. Hasil Uji F Model Persamaan 2

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	57,964	4	14,491	2,521	,036 ^b
Residual	68,974	12	5,748		
Total	126,938	16			

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada Tabel 6 menyatakan bahwa variabel PAD, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan

pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap IPM, dengan presentase taraf signifikan sebesar $0,36 > 0,05$. Tabel 15 menunjukkan bahwa PAD, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang simultan dan signifikan terhadap IPM. Adapun hasil dari uji simultan pada nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($2,521 < 2,131$).

Uji Parsial/Uji t

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel intervening pertumbuhan ekonomi (Y1) dan variabel independen PAD (X1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2), dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X3) berpengaruh satu sama lain secara parsial atau individu. Tabel 7 berikut memberikan penjelasan lebih lanjut hasil uji t persamaan 1. Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa pengaruh variabel PAD, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Variabel PAD terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki taraf signifikan $0,990 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengujian pada taraf signifikan ($\alpha = 0,05$). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, H1 diterima dan H0 ditolak. Pada variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki taraf signifikan $0,008 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengujian pada taraf signifikan ($\alpha = 0,05$). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak, H1 ditolak dan H0 diterima. Dan, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki taraf signifikan $0,321 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengujian taraf signifikan ($\alpha = 0,05$). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak, H1 ditolak dan H0 diterima.

Tabel 7. Hasil Uji t Model Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	9,899	1,445			6,852	,000
PAD	8,7639	,000	,002		,013	,990
Kesehatan	2,76912	,000	,055		,199	,846
Pendidikan	1,17711	,000	,846		-3,152	,008

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, diperoleh hasil Variabel PAD terhadap IPM memiliki taraf signifikan $0,557 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM dengan pengujian pada taraf signifikan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak, H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM memiliki taraf signifikan `positif dan tidak signifikan terhadap IPM dengan pengujian pada taraf signifikan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak, H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM memiliki taraf signifikan $0,170 > 0,05$ yang menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dengan pengujian taraf signifikan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ini ditolak, H1 ditolak dan H0 diterima.

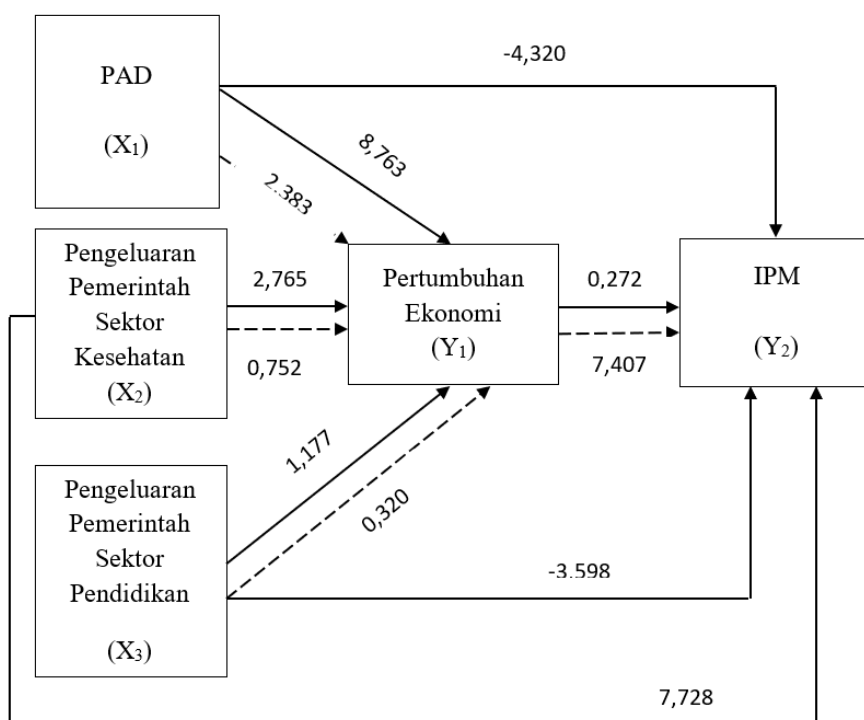
Kemudian Variabel pertumbuhan ekonomi terhadap IPM memiliki taraf signifikan $0,377 > 0,05$ yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dengan taraf signifikan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ini ditolak H1 ditolak dan H0 diterima.

Tabel 8. Hasil Uji t Model Persamaan 2

Model	t	Sig.
1 (Constant)	20,532	,000
PAD(X1)	-,604	,557
Kesehatan(X2)	-2,411	,033
Pendidikan(X3)	1,458	,170
Pertumbuhan(Y1)	,918	,377

Sumber: data olah Output SPSS 23, 2023

Uji Path Analysis



Gambar 3. Model Analisis Jalur

Sumber: diolah, 2023

Tujuan dari model analisis jalur (*path analysis*) SPSS ini adalah untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaruh variabel intervening. Gambar 3 menunjukkan adanya pengaruh langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 8,763; Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,769; Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 1,177; Pengaruh langsung PAD terhadap IPM adalah sebesar 0,272; Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM adalah sebesar

-4,320; dan Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM adalah sebesar 7,728.

Pengaruh tidak langsung pada penelitian berdasarkan hasil adalah variabel PAD terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,383; Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi adalah 0,752; dan Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi adalah -0,320

Total pengaruh atau hasil penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung adalah; pada variabel PAD (X1) terhadap IPM (Y2) sebesar 7,587; Pengaruh total pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) terhadap IPM (Y2) sebesar 1,786; dan Pengaruh total pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X3) terhadap IPM (Y2) adalah 3,279

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan $0,990 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 8,763 yang berarti PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 – 2023. Berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh bahwa antara PAD dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh tidak signifikan. Penyebab terjadinya hal ini dikaitkan dengan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah sangat sedikit yaitu sebesar 9,57% dari total pendapatan daerah yang sah.

Teori Harrod-Domar mengungkapkan setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan jika hanya mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan bentuk modal, jika dianggap ada hubungan ekonomi secara langsung antara besarnya stok modal dan output total, maka setiap tambahan bersih stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output tersebut (Teddy 2022).

Pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu PAD masih tergolong khusus yang di mana dari kategori kurang ke sedang. Sehingga, PAD belum bisa menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi dikarenakan PAD merupakan penyumbang pendapatan paling sedikit di Provinsi Sulawesi Barat dan yang jadi pendapatan tumpuan pemerintah di daerah adalah pendapatan transfer dengan proporsi mencapai 89,43%. Meskipun tiap tahunnya PAD di Provinsi Sulawesi Barat meningkat tetapi target realisasi PAD belum tercapai yaitu dari 67,95% di tahun 2022 dan di tahun 2023 masih 50,63% (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat 2019).

Adapun penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yaitu (Prakasa 2014) variabel PAD mempunyai hubungan yang tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD yang diterima oleh beberapa Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan

ekonomi. PAD diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber yang dilihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Kabupaten Kota tidak berjalan secara maksimal. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Barimbing dan Karmini 2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Kota dan Jawa 2015) juga menyatakan hal yang sama bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan $0,519 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,887$ yang berarti pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007–2023. Berdasarkan hasil penelitian pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat dikarenakan pengaruh anggaran pemerintah untuk kesehatan terhadap perbaikan ekonomi bahwa ternyata anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan tidak selalu tepat diarahkan untuk memperbaiki alokasi kesehatan dan juga adanya kelemahan kapasitas tenaga perencana di Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah atas kesehatan memang belum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena proses perbaikan kesehatan masyarakat dalam pengeluaran pemerintah tidak dapat langsung terlihat pengaruhnya. Terdapat tenggang waktu ketika pemerintah mengeluarkan sejumlah anggaran pembangunan untuk kesehatan sehingga kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Teori Rostow dan Musgrave menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan lebih banyak barang dan jasa publik dengan kualitas yang lebih baik, agar terjadinya perpindahan pada aktivitas pemerintah dari penyediaan sarana dan prasarana ke belanja pemerintah untuk kegiatan sosial, seperti program jaminan hari tua, dana pensiun, pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Dalam suatu proses pembangunan, rasio antara investasi swasta terhadap Produk Nasional Bruto akan semakin besar, tetapi rasio antara investasi pemerintah terhadap GNP semakin kecil (Izhaty 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Suparno 2015) yang menunjukkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. dikarenakan adanya kelemahan kapasitas tenaga perencana dan pelaksana program maupun terjadinya proses *rent seeking* yang sangat dahsyat sehingga nilai dari proyek tidak sampai pada sasaran yang sebenarnya.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan $0,008 < 0,05$ dengan nilai

koefisien regresi sebesar 1,177 yang berarti pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007–2023. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan investasi tidak langsung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan modal manusia, semakin besar pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maka dapat meningkatkan modal manusia di bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat juga akan meningkat.

Teori Peacock & Wiseman menyatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya dengan meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, meskipun tarif pajak yang ditetapkan tidak mengalami perubahan, tetapi pertumbuhan ekonomi menyebabkan pajak yang dipungut oleh pemerintah semakin meningkat. Semakin meningkatnya penerimaan negara ini maka akan menyebabkan pengeluaran negara juga akan naik (Izhaty 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dianaputra dan Aswitari (2017) yang menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk yang dapat menyelesaikan sekolahnya ke tingkat tinggi, semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat maka semakin tinggi juga pemahaman terhadap keterampilan dalam meningkatkan kualitas manusia.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM memiliki nilai signifikan $0,989 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,004$ yang berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM pada tahun 2007-2023. Berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan IPM di Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap IPM menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi belum menjangkau semua sektor terutama di sektor kesehatan dan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia dan juga terjadinya naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan dampak kecil terhadap IPM. Hal ini juga dikarenakan pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat yang mengalami fluktuatif sehingga beberapa tahun terjadi penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan juga penurunan dari berbagai macam sektor, maka mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan meningkatkan kemiskinan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Sulawesi Barat.

Konsep pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual, ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang di mana memicu pertumbuhan ekonomi agar dapat dilakukan pembangunan manusia, baik dalam konteks nasional maupun regional. Hal ini dianggap penting karena kebijakan sebuah pembangunan

yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat memberikan manfaat dalam mengurangi disparitas antar daerah (Brata 2010).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayati dan Imaningsih (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki tingkat signifikan terhadap IPM. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan dan tingkat pendidikan serta meningkatnya produktivitas yang tidak merata di seluruh masyarakat. IPM suatu daerah akan meningkat akibat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi di mana akan meningkat pula pendapatan per kapita masyarakat, semakin besar dampak pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu juga akan berdampak dalam menurunnya pendapatan per kapita masyarakat. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Farwas (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pitaloka (2022) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Pengaruh PAD terhadap IPM

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap IPM memiliki nilai signifikan $0,557 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-4,320$ yang berarti PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM pada tahun 2007 – 2022. Berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh bahwa PAD dan IPM di Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh tidak signifikan, karena pemerintah Provinsi belum memaksimalkan pembiayaannya untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat, melainkan lebih digunakan dalam kegiatan belanja pegawai. Pemasukan PAD di Provinsi Sulawesi Barat juga belum maksimal sehingga masyarakat perlu berkontribusi untuk membayar pajak yang di mana hasil dari pajak tersebut akan di masukkan dalam Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fadhly 2013) hal ini menunjukkan variabel PAD memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap IPM. Koefisien regresi sebesar $-0,399$ artinya setiap peningkatan 1% PAD daerah maka IPM daerah tersebut akan menurun 0,399 persen dalam hal ini, faktor lain di anggap tetap yaitu jika PAD bertambah maka IPM akan mengalami penurunan. Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini (Sulastri dan Efendri 2019) variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, hal ini berarti bahwa meningkatnya PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan IPM. Berdampaknya PAD terhadap IPM dikarenakan PAD banyak digunakan untuk mendanai belanja modal yang nantinya akan digunakan untuk pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan di daerah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap IPM

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM memiliki nilai signifikan $0,033 < 0,050$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-3,598$ yang berarti pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM pada tahun 2007 – 2023. Berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan IPM di Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh signifikan terhadap IPM. Adanya peningkatan kualitas dan jaminan

kesehatan yang baik bagi masyarakat maka merupakan penunjang berjalannya kegiatan ekonomi yang lancar maka akan meningkatkan pula IPM di Provinsi Sulawesi Barat.

Kesehatan adalah hal yang menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan mendorong peningkatan produktivitas yang semakin tinggi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Aspek kesehatan juga menjadi penentu pembangunan manusia, sehingga IPM menempatkan kesehatan sebagai salah satu penentu dalam pengukurannya. Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, maka sangat dibutuhkan faktor pendorong peningkatan standar kesehatan itu sendiri, yang terdiri dari kebutuhan sarana dan juga prasarana di dalam kesehatan (Isyandi dan Aulia 2022).

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM memiliki nilai signifikan $0,170 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 7,728 yang berarti pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil olahan data pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM berpengaruh tidak signifikan dikarenakan meskipun fasilitas pendidikan di seluruh Provinsi Sulawesi Barat sudah mengalami peningkatan akan tetapi tingkat perkembangan SDM rendah yang menyebabkan pertumbuhan IPM tidak signifikan. Belum terealisasinya program pendidikan secara menyeluruh dan tepat sasaran dan juga masih adanya ketimpangan dalam pengalokasian anggaran pemerintah terhadap masyarakat.

Teori Human Capital, pendidikan merupakan bentuk suatu investasi sumber daya manusia sama halnya dengan kesehatan, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat pembangunan manusia. Karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran kemiskinan yang dimana apabila tingkat kemiskinan rendah maka pembangunan manusia meningkat, yang dimana sumber manusia dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia yang dapat mengacu pada pendidikan. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri (Irna 2015).

Adapun penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah (Muhammad 2022) variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM berpengaruh tidak signifikan, dikarenakan pengeluaran sektor pendidikan di suatu daerah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Demikian juga dengan indikator yang berkaitan dengan pembangunan manusia yang menunjukkan kecenderungan yang meningkat pula. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan maupun pembangunan manusia, dibarengi dengan semakin membaiknya indikator IPM yang ditandai dengan semakin menurun juga jumlah dari penduduk miskin. Namun sasaran utama variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yaitu untuk meningkatkan IPM. Kemudian setelah IPM membaik barulah bisa diketahui dan dilihat kondisi IPM yang berkurang, sehingga variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini yaitu Muslihatinningsih, Alvidiar, dan Niken Wilantari (2023) dari hasil penelitian ini pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Irna

(2015) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh PAD terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 8,763 sedangkan pengaruh tidak langsung PAD terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 2,383 dan pengaruh total adalah 7,587. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh total PAD terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pedoman dalam biaya daerah, PAD yang semakin membesar mempunyai kemampuan untuk pencapaian otonomi daerah yaitu peningkatan layanan serta kemakmuran penduduk yang terukur dengan IPM yang berjalan dengan tepat dan sesuai rencana. Selanjutnya, jika Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan maka tidak akan berdampak nyata terhadap IPM, maka PAD tidak berpengaruh terhadap IPM (Karampunan 2023).

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh langsung pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi 2,769 sedangkan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0,752 dan pengaruh total adalah 1,786. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung pengeluaran sektor kesehatan lebih dominan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui IPM.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh layanan kesehatan yang berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan yang merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Perbandingan dana pada sektor pendidikan yang lebih kecil akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan kurang mampu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat dilihat pada pengeluaran sektor kesehatan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan belum terealisasi dengan baik, jadi untuk dinas kesehatan agar turun langsung untuk meningkatkan fasilitas peralatan dan perlengkapan kesehatan, agar tingkat IPM dapat meningkat lebih baik (Kahang 2016). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Agus 2015) bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM dan penelitian (Lita Nia 2021) yang menyatakan bahwa pengeluaran sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM sebesar 1,177 sedangkan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi

sebesar -0.320 dan pengaruh total adalah 3,279. Hasil ini menunjukkan secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan lebih dominan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan belum berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru dan siswa tetapi lebih banyak digunakan untuk infrastruktur dan juga masih adanya disparitas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang cukup besar. Sehingga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian Muliza, Zulham, dan Seftarita (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan juga penelitian ini sejalan dengan (Mandey 2022) bahwa pengeluaran sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, yang disebabkan oleh ketimpangan pendapatan antar daerah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena alokasi anggaran yang kurang tepat dan kapasitas perencanaan yang lemah. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan tinggi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas manusia.

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PAD menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak secara langsung meningkatkan IPM. Pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, mencerminkan alokasi dana kesehatan yang belum efektif. Pengeluaran sektor pendidikan menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, karena meskipun fasilitas pendidikan telah membaik, perkembangan sumber daya manusia masih rendah. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, dipengaruhi oleh ketidakmerataan pendidikan, produktivitas, dan kemiskinan.

Secara tidak langsung, PAD dan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran sektor pendidikan menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam alokasi anggaran dan perencanaan untuk meningkatkan IPM di Sulawesi Barat.

Referensi

Afifah, I., & Sopiany, H. M. 2017. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010- 2017)."

- Aldillah Zafira huriya. 2021. "Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2019." Pakuan Bogor.
- Andiny, Puti, dan Merlindiana Gus Puja Sari. 2018. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol. 2(2):116–25.
- Barimbing, Yesika, dan Ni Karmini. 2015. "Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 4(5):434–50.
- Desmawan, Deris, dan Rizal Syaifudin. 2020. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung." *Jurnal Ekonomi-Qu* 10(1):117. doi: 10.35448/jequ.v10i1.8594.
- Dianaputra, I. Gede Komang Angga, dan Luh Putu Aswitari. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Perumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015." *E-Jurnal EP Unud* 6:286–311.
- Farwas, Elia Linando. 2020. "Pengaruh sumber keuangan PAD & non PAD terhadap IPM Kabupaten Bian Numfor Provinsi Papua."
- Fretes, Pieter Noisirifan De. 2017. "Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kelpulauan Yapen." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 2(2):1–33.
- Harry A. P. Sitaniapessy. 2013. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD." *Jurnal Economia* 9(1):40.
- Hidayati, Dwi Rahayu, dan Niniek Imaningsih. 2022. "Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan , kesehatan , pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap." *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 4(4):703–10. doi: 10.30872/jfor.v24i4.11875.
- Irianto. 2021. "Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia." 1258–65.
- Ismail, I. F., E. N. Walewangko, dan Javline I Sumual. 2021. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21(03):109.
- Isyandi, Zudrun Maryozi B., dan Ando Fahda Aulia. 2022. "Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan , Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau." 15(1):1–11.

- Kahang, Merang, Muhammad Saleh, dan Rachmad Budi Suharto. 2016. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur." *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 18(2), 130-140 18(2):130–40.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. 2019. "Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018." 1–129.
- Karampuan, Alfrida, Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, Diana Lestari, Fakultas Ekonomi, dan Universitas Mulawarman. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur." 1(3):66–76.
- Laisina, Masinambow, dan Rompas. 2015. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(4):193–208.
- Lita Nia, April. 2021. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Mi):5–24.
- Mahuze, Wilhelmus, Vecky A. J. Masinambow, dan Agnes L. Ch. P. Lopian. 2022. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boven Digoel." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22(3):1–12.
- Malik, Muhammad, Sylvia Sjarlis, dan Didiek Handayani Gusti. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia* 3(4):661–75.
- Mandey, Aprilany. 2022. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Atas Infrastruktur, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Diprovinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22(2):101–9.
- Manek, Marianus, dan Rudi Badrudin. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Telaah Bisnis* 17(2):81–98. doi: 10.35917/tb.v17i2.49.
- Manengkey, Mody T., Debby Ch. Rotinsulu, dan Ita Pingkan F. Rorong. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Petumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010-2020." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22(7):109–20.

- Meydiasari, Dewi Azizah, dan Ady Soejoto. 2017. "Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 01(02):47–54.
- Millenia, Erliza, dan Dewi Zaini. 2021. "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di." *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 10(November):106–14.
- Mimi Hardini. 2017. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kerja Terhadap Tingkat PeKesempatanngangguran Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 5(1):1–5.
- Muhammad, Aguspriyanto Alifuddin. 2022. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Regional Bruto Terhadap Indeks Effect of Government Expenditure in The Health, Education Sector And Gross Regional Domestic Products on The Human Development Index in The Provinces of Java." *jurnal ekonomi manajmen akuntansi* (1):1–11.
- Muliza, Muliza, Teuku Zulham, dan Chenny Seftarita. 2017. "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3(1):51–69. doi: 10.24815/jped.v3i1.6993.
- Muslihatinningsih, Fivien, Caren Alvidiar, dan Regina Niken Wilantari. 2023. "Does government spending affect Human Development Index in East Java Province." *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 8(1):138–49. doi: 10.29407/jae.v8i1.19806.
- Novi, Primitasari, dan Abdillah Irsyadul Ibad. 2023. "Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan insfrakstruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur." *Ilmu Ekonomi (JIE)* 7(03):494–503.
- Paat, Dewi Chrisanty, Rosalina A. M. Koleangan, dan Vekie Adolf Rumat. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(1):1–10. doi: 10.35794/jpekd.15774.19.1.2017.
- Palaneven, Themby O. M., Een N. Walengwangko, dan Jacline I. Sumual. 2018. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(4):52–61.
- Pitaloka, Mayang Dwi. 2022. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap IPM 14 Kabupaten." (2021):1–12. doi: 10.29407/jae.v7i2.17692.

- Prakasa, febrian dwi. 2014. "pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012." *Jurnal Ilmiah* 10(2):1–94.
- Pratiwi, Ni Putu Ambar, dan I. Gusti Bagus Indrajaya. 2019. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali." *Buletin Studi Ekonomi* 220. doi: 10.24843/bse.2019.v24.i02.p05.
- Putra, Halil Haqizul. 2022. "Analisis Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Dan Net-Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2020." (2019):8–20.
- Putri, Irena Ade, dan Yoyok Soesatyo. 2016. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4(3):1–7.
- Riska Aini. 2020. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Riviando, Adel, Henri Agustin, dan Halmawati. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(1):1–17.
- Rori, Chindy Febry, Antonius Y. Luntungan, Audie O. Niode, Jurusan Ekonomi Pembangunan, dan Fakultas Ekonomi. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2):243–54.
- Rusdiana A, Ibrahim Tatang. 2020. "Manajmen Pengembangan Human Capital Pendidikan." Hal. 1–471 in *Manajmen Pengembangan Human Capital*.
- Rusydi Ulum Bahrul, dan Jafar Rizka. 2021. "Ekonomi Publik." Hal. 164–65 in *Ekonomi Publik*, diedit oleh Qarina.
- Safitri, Nanda. 2021. "Membangun Perekonomian Rakyat." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2):117.
- Sari, Ida Ayu Candra Yunita, dan Ni Luh Supadmi. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia." *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15Sari, Id:2409–38.
- Setiawan, Angga, dan Fikriah. 2020. "Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 5(4):212–21.

- Setiawan, Gusi Bagus Kompiang Putra, dan Dewa Nyoman Budiana. 2015. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 4(10):1276–1303.
- Soleh, Mohammad, dan Nunung Wahyuni. 2021. "Pengaruh IPM, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dengan Zakat Sebagai Moderating." *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6(2):86–106.
- Sukmana Raditya. 2017. "Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 1, Juni 2017." 2:67–91.
- Sulastrri, Evi, dan Efendri. 2019. "Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019)." *Keywords in Qualitative Methods* 1–12.
- Suparno, Heri. 2015. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur." *Journal of Innovation in Business and Economics* 5(1):1. doi: 10.22219/jibe.vol5.no1.1-22.
- Susanto, Aris Budi, dan Lucky Rachmawati. 2013. "Pengaruh Indeks Pembangunan (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ekonomi Unesa* 1(3):6.
- Teddy, Christianto Leasiwal. 2022. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan variabel makro ekonomi.
- Tjodi, Andi Maujung, dan Tri Oldy Rotinsulu. 2019. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara)." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(8). doi: 10.35794/jpekd.23428.19.8.2018.
- Tuwo, Romi Daniel, Debby Christina Rotinsulu, dan George M. .. Kawung. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21(4):79–90.
- Utami, Desak Nyoman, dan I. Gusti Bagus Indrajaya. 2019. "Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali." *E-Jurnal EP Unud* 8(10):2195–2225.
- Verawaty, Rolia Wahasusmiah, dan Amnah. 2020. "Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Alokasi Belanja Modal." (1):1–15.